



“Bersatu, Hancurkan Kaum SERAKAH-NOMICS!”

Sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan seluruh umat manusia, cita-cita mulia para leluhur Bangsa adalah Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, bebas dari segala bentuk penjajahan bangsa atas bangsa, manusia atas manusia, sebagai landasan yang kokoh untuk membangun masyarakat yang adil makmur, bahagia lahir batin, gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja. Wujud kemerdekaan itu jika bangsa kita lepas dari imperialisme, lepas dari oligarki, lepas dari birokrat korup, dan lepas dari siklus kemiskinan.



Imperialisme, Oligarki dan Birokrat Korup adalah TIGA MUSUH RAKYAT Indonesia, mereka adalah KAUM SERAKAH-NOMICS, yang menjadikan hidup rakyat Indonesia terjajah dan miskin, maka dari itu agar bangsa Indonesia bangkit, hidup adil dan makmur, lahir maupun batin. Tidak ada jalan, selain melenyapkan kaum SERAKAH-NOMICS, dari bumi Pertiwi Indonesia.



1. IMPERIALISME

Akibat kekuasaan imperialisme, sumber daya alam serta kehidupan ekonomi, hanya digunakan untuk melayani kemajuan negara-negara lain. Dengan pengaruhnya, baik ideologi, politik dan ekonomi, mereka selalu melemahkan dan memecah belah bangsa Indonesia. Mereka terus menerus menghalangi kemajuan bangsa Indonesia, dengan cara mendeligitimasi program-program kerakyatan, kepemimpinan dan persatuan nasional, agar mereka bisa leluasa merampok sumber daya alam kita. Tidak ada sedikitpun keinginan bagi kaum Serakah-nomic untuk memajukan serta memakmurkan kehidupan satu bangsa yang mereka kuasai, selain ekspansi dan dominasi kekuasaan kapital mereka.

2. OLIGARKI

Kaum SERAKAHNOMIC ini, adalah segelintir orang yang kehidupannya menguasai sumber daya alam, lahan, pertambangan, perkebunan, perhutanan, perikanan, perdagangan, pangan, energi. Dengan kekuasaan kapitalnya mereka terus menerus mengintervensi kehidupan politik, melalui lembaga-lembaga politik, untuk memenangkan agendanya, yaitu menguasai sumber-sumber kehidupan ekonomi.



3. ELIT & BIROKRAT KORUP

Dalam sistem yang baik, akan menghasilkan kepemimpinan yang baik, namun di bawah kekuasaan yang imperialistik dan oligarkis, akan menghasilkan elit dan birokrat korup.

Elit dan birokrat akan bertindak menjadi agen-agen dengan imbalan sogokan serta fasilitas, memanipulasi anggaran negara dan mencuri uang negara. Kelompok ini hanya hidup untuk memperkaya diri, tidak peduli nasib bangsa dan negaranya. Mereka adalah tikus tikus gemuk, yang hidup di tengah masyarakat yang miskin.

APA YANG HARUS DIKERJAKAN?

Bumi, air dan kekayaan alam, dikuasai negara bukan swasta ataupun asing. Dikelola dengan sistem kekeluargaan, bukan kapitalistik, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk segelintir kaum serakahnomic.

Kita harus kembali ke Pancasila sebagai dasar dan bintang penuntun arah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan menjalankan secara konsekuen amanat konstitusi, yaitu Pasal 33 UUD 1945. Sistem ekonomi yang memosisikan swasta, negara dan rakyat sebagai pelaku ekonomi, harus menempatkan sektor ekonomi yang strategis dan menyangkut kehidupan umum, dikuasai negara, dan menjadikan rakyat sebagai subyek ekonomi.

Trickle down effect yang kapitalistik harus diganti dengan konsep ekonomi bottom up, dengan menjadikan rakyat sebagai subyek dan koperasi sebagai jalan pembangunan ekonomi. Menjadi soko guru ekonomi.



POSISI PEMERINTAH

Saat ini Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sedang berjuang sekuat-kuatnya untuk mengenyahkan sistem serakahnomic dari Bumi Indonesia. Negara harus menjadi pimpinan ekonomi, bukan sekedar regulator, dengan menjadikan rakyat sebagai subyek ekonomi. Salah satu langkah yang paling kongkrit adalah dengan penerbitan PP. Nomor 8 tahun 2025, tentang Devisa Hasil Eksport (DHE) yang wajib disimpan dalam negeri, penertiban aset agraria dengan menyita lahan perkebunan dan pertambangan ilegal, seluas 3 juta hektar. Inpres. No. 9 tahun 2025, tentang Koperasi Desa-Kelurahan yang menjadikan rakyat sebagai tulang punggung ekonomi. Pengentasan kemiskinan dengan program pemberdayaan, makan bergizi gratis (MBG) dan sekolah rakyat.

TUGAS RAKYAT DAN ORGANISASI KITA

Sejak berdirinya LIGA MAHASISWA NASIONAL UNTUK DEMOKRASI (LMND), tanggal 9-11 Juli 1999. Telah secara tegas menentang imperialisme, oligarki dan birokrat korup, karena tiga unsur Serakahnomic inilah penyebab rakyat Indonesia sejak zaman kemerdekaan sampai sekarang miskin. Gerakan ini, sedang dijalankan Pemerintah Prabowo-Gibran. Untuk itu, LMND harus mendukung dan mendorong agar program nasionalis kerakyatan ini Dijalankan dengan baik, sekaligus menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mendukung, mengawal dan mengamankan program-program tersebut.





POKOK-POKOK *SERAKAHNOMICS*

AKAR MASALAH BANGSA DAN SOLUSINYA



**LIGA MAHASISWA
NASIONAL UNTUK
DEMOKRASI**

I. PENDAHULUAN : Memaknai Serakahnomics

Serakahnomics adalah sebuah istilah yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menggambarkan suatu pola ekonomi yang digerakkan oleh keserakahan. Istilah ini kerap disampaikan dalam pidato- pidatonya, termasuk pidato kenegaraan, sebagai kritik terhadap praktik ekonomi yang hanya mengejar keuntungan pribadi tanpa memedulikan kepentingan rakyat.



Dalam beberapa kesempatan, Presiden Prabowo mengancam praktik pelaku ekonomi yang hanya mengambil untung demi kepentingan pribadi tanpa memedulikan kepentingan rakyat banyak. Praktik seperti ini didasari dan digerakkan oleh sifat serakah atau rakus. Sederhananya, praktik ekonomi yang didasari oleh kerakusan atau keserakahan disebut **serakahnomics**.

"Kami akan menyelamatkan rakyat. Kami akan bela kepentingan rakyat. Kami pastikan rakyat Indonesia tidak menjadi korban serakahnomics"

PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO

Istilah ini memang tidak ditemukan dalam buku-buku atau teori ekonomi konvensional. Prabowo menyebut **serakahnomics** sebagai mazhab (haluan atau aliran) ekonomi baru secara terminologi, dimana ia menyebut mazhab ekonomi ini bukan kapitalisme, sosialisme, negara kesejahteraan dan sebagainya, tetapi istilah yang menusuk jantung persoalan dengan bahasa yang mudah dimengerti: serakah-nomics.

Serakah atau sifat rakus digabung dengan nomics yang merujuk kepada ekonomi.

SERAKAH	+	NOMICS	=	SERAKAHNOMICS
Sifat rakus		Ekonomi		

Presiden Prabowo menekankan bahwa serakahnomics bertentangan dengan semangat keadilan sosial-ekonomi dalam **Pancasila** dan **Konstitusi UUD 1945**, terutama **Pasal 33**. Ia menegaskan bahwa di bawah pemerintahannya, serakahnomics akan menjadi musuh bersama yang harus ditumpas agar ekonomi dapat kembali ke rakyat. Persis seperti yang kita kehendaki, yaitu **"ekonomi untuk rakyat bukan rakyat untuk ekonomi"**.

Memaknai **Serakahnomics**

Selama ini, praktik ekonomi yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan tidak peduli dengan rakyat banyak terjadi di berbagai sendi kehidupan sehari-hari, seperti misalnya yang diungkap Presiden Prabowo, yaitu di sektor pangan. Adanya kartel beras dan pelaku usaha curang yang membeli gabah di bawah harga pasar lalu menjual beras dengan harga tinggi, sangat merugikan petani dan konsumen.

Selain itu, Presiden Prabowo juga menyampaikan paradoks dan ironisnya negara ini sebagai produsen minyak sawit terbesar, tetapi mengalami kelangkaan minyak goreng. Penyebabnya jelas dia ungkap, yaitu pelaku ekonomi yang serakah.

Itu hanya satu contoh pelaku **serakahnomics**. Praktik keserakahan ekonomi telah menjadi sistemik melalui regulasi dan terlembaga, bahkan telah menjadi semacam ideologi atau keyakinan umum. Fenomena keserakahan dalam sistem ekonomi sangatlah nyata terlihat di sekitar kita. Kerap kita saksikan, kasus pejabat publik yang hidup bermewah-mewah, anak dan keluarganya flexing barang mahal, liburan luar negeri, padahal hasil korupsi.

Contoh Nyata **Serakahnomics**:

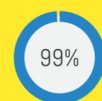
1. Kartel Pangan: Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mencatat adanya margin 40-60% dalam rantai pasok beras yang dinikmati pelaku tengah, sementara petani hanya mendapat 20-30% dari harga jual konsumen (Kompas, 2023).
2. Minyak Goreng Langka: Meski Indonesia produsen CPO terbesar dunia, terjadi kelangkaan minyak goreng tahun 2022 akibat ekspor besar-besaran dan penimbunan oleh kartel sawit (Tempo, 2022).



Tapi teramat banyak pula kita saksikan, bahkan kita - rakyat biasa - rasakan, betapa sulit hidup untuk sekadar makan, minum dan sekolah. Kita sering terpukul ketika harga naik, jatuh sakit dan kehilangan pekerjaan. Jurang ketimpangan ekonomi semakin lebar ketika segelintir orang menumpuk kekayaan karena serakah dan curang, sementara banyak orang mesti bergulat untuk memenuhi kebutuhan dasar.



**SEGELINTIR
ORANG**



**RAKYAT
BANYAK**

Pada dasarnya, sumber daya alam kita melimpah. Cukup untuk memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia bila diproduksi dan distribusi dengan adil. Namun kenyataanya, ketimpangan ekonomi di Indonesia semakin jomplang.

Serakahnomics cocok dengan logika Kapitalisme



Menyoal Kembali istilah **serakahnomics** sebagai mazhab ekonomi baru yang berbeda dengan corak produksi ala kapitalisme maupun sosialisme murni yang diajukan Presiden Prabowo penting untuk digaris-bawahi. Dalam bukunya Paradoks Indonesia dan ditegaskan dalam berbagai kesempatan, Prabowo menyebut kehendaknya untuk Kembali menegaskan rancang bangun sistem ekonomi berdasarkan Pasal **33 UUD 1945**.

Rancang bangun **Pasal 33** itu sering disebut sebagai ekonomi kerakyatan atau sistem ekonomi campuran. Prabowo mengklaim bahwa sistem ekonomi konstitusional Indonesia adalah percampuran dari sari terbaik dari sistem kapitalisme dan sosialisme yaitu semangat kreativitas individu dan peran negara dalam tata Kelola asset dan akses terhadap sumber daya material.

Perlunya peran negara atas Kapitalisme murni yang gagal menjalankan doktrin trickle down effect, yaitu keyakinan bahwa dorongan kepentingan pribadi akan menghasilkan kekayaan kelas atas mengalir ke tingkat masyarakat bawah, justru hanya memuluskan **ketimpangan ekonomi**: yang kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin.

Di atas keyakinan **kapitalisme**: setiap **individu setara** akan berkompetisi dalam **pasar bebas** akan mencapai kemakmuran bangsa telah menghasilkan **ketimpangan ekstrim**.

Kondisi terakhir itu menyoroti sifat yang melekat pada sifat **kapitalisme** yaitu kekuatan modal yang selalu menumpuk (**akumulatif**), memperluas (**ekspansif**) dan menghisap (**eksploitatif**) kekayaan sumber daya material dengan mengorbankan alam dan tenaga manusia. Cara produksi kapitalistik ini compatible, cocok atau berkesesuaian dengan sifat serakah pelaku ekonomi.

Serakahnomics yang dicetuskan Presiden Prabowo Subianto merupakan kritik terhadap ekonomi rente (rent-seeking economy) yang telah berlangsung puluhan tahun di Indonesia. Istilah ini mengacu pada sistem ekonomi dimana aktor-aktor tertentu menguasai sumber daya melalui mekanisme non-produktif, seperti:

- Monopoli dan oligopoli
- Kartel Korupsi regulasi
- Eksploitasi sumber daya
- alam tanpa nilai tambah



Serakahnomics dari etika-moral sampai ekonomi-politik

Seperti halnya sifat pembenci, iri atau rasa takut adalah sifat bawaan manusia. Setiap orang merasa takut pada sesuatu sehingga dapat membuatnya lebih waspada. Setiap orang yang iri atas capaian orang lain dapat memotivasi dirinya untuk menjadi atau mendapat yang lebih baik.

Begitupun rasa tidak puas atau pada tingkatan lebih parah yaitu rakus atau serakah. Seseorang yang oleh karena situasi keterbatasan, memanfaatkan pemenuhan kepentingan diri sendiri untuk mendorong supaya ia bisa tetap bertahan hidup.

Namun sifat serakah yang mementingkan diri sendiri dan mengorbankan orang lain tidak hanya akan menjadi pembahasan moral atau etika semata ketika itu menjadi perilaku sistemik dalam konteks kehidupan sehari-hari di lapangan ekonomi dan politik.



Mahatma Gandhi pernah mengingatkan: *"dunia ini cukup kaya untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi tidak cukup untuk memenuhi keserakahan segelintir orang."*

Oleh karenanya, dalam kehidupan bersama, perlunya pembatasan, aturan, norma, etika, hukum hingga kelembagaan modern seperti negara menjadi relevan sebagai instrumen sosial untuk memastikan sifat serakah manusia tidak menghancurkan manusia itu sendiri.

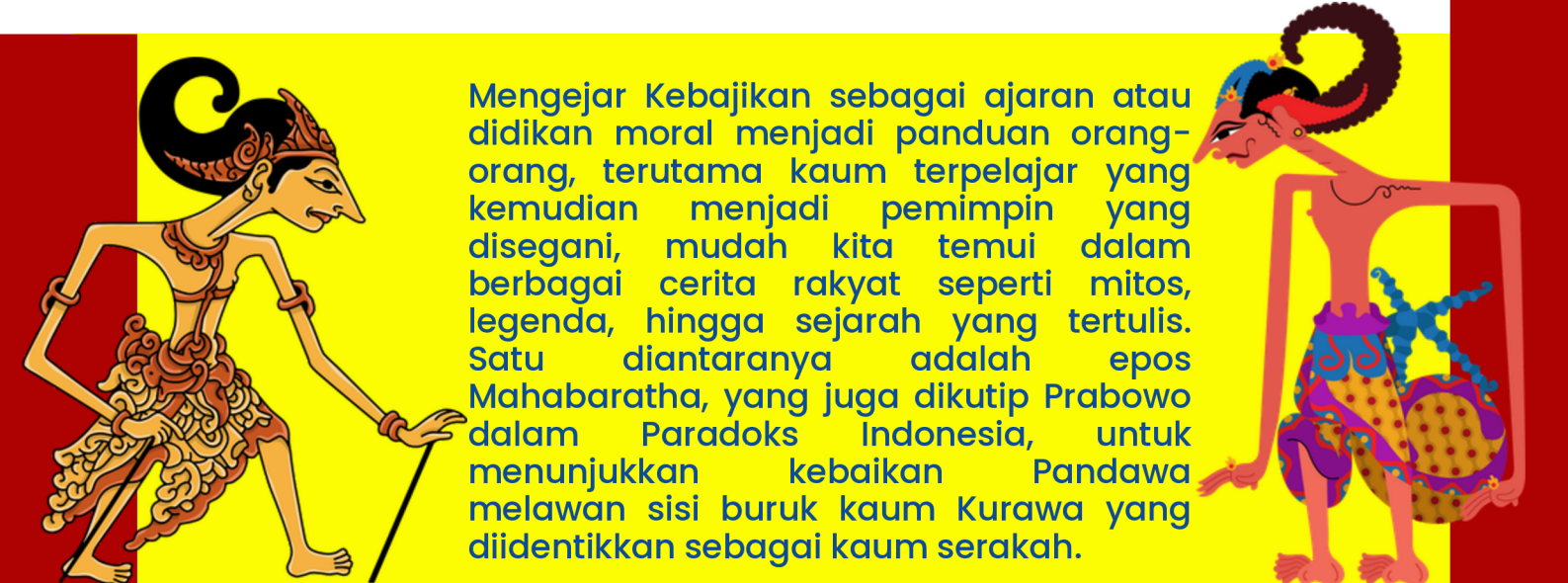
Akan tetapi, sejarah panjang umat manusia menunjukkan bagaimana keserakahan itu menjadi sistemik dan mengakibatkan perang dimana-mana demi perebutan akan sumber daya material yang terbatas. Para pakar ekonomi, politik dan sejarah telah banyak mengurai berbagai masalah umat manusia, terutama perang, berakar pada perebutan sumber daya ekonomi.

II. Akar Historis **Serakahnomics** di Indonesia



Di Indonesia, jauh sebelum dideklarasikan sebagai negara Merdeka, Masyarakat Nusantara hidup dengan kekayaan alam yang melimpah. Sistem kesukuan, Feodal, Kedatuan hingga Kerajaan yang ada, meski tidak luput dari konflik, masyarakatnya hidup dengan sistem nilai masing-masing yang minim ketimpangan ekonomi. Bahkan di beberapa daerah, tidak mengenal kosa kata miskin. Semua hidup berdasarkan pembagian kerja sebagai status sosial yang melekat padanya.

Pada tahap tertentu perkembangan sejarahnya, beberapa Kedatuan dan Kerajaan di Nusantara bahkan pernah mencapai puncak kemakmuran bangsanya mulai dari Kedatuan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit hingga Mataram Islam serta beberapa Suku lainnya. Keserakahan menjadi musuh diri dalam menjalankan dharma untuk hidup yang baik.



Namun, narasi ini kurang cukup untuk menjelaskan **serakahnomics** hanya dari sisi moral, apalagi didasarkan pada narasi fiksi semata. Kita mesti memulainya dari sejarah yang pasti, dimana serakahnomics atau perilaku ekonomi curang dijelaskan secara material terjadi hingga konsekuensinya sampai sekarang di Indonesia.



VOC – Kolonialisme(Pelopor **Serakahnomics**)

Sejak perjumpaan antar bangsa terjadi, Nusantara yang menjadi fokus pembahasan ini terlibat diantaranya, dorongan untuk melakukan transaksi dagang semakin pesat. Sejumlah catatan sejak abad 7 dari Tiongkok, Korea, Arab, India dan sebagainya membuktikan bahwa Nusantara telah tertaut aktivitas ekonomi dengan bangsa-bangsa di dunia, jauh sebelum ekspedisi Eropa yang mengakibatkan penaklukan dan kolonisasi.



Fase ini dikategorikan oleh para teoritikus ekonomi sebagai fase merkantilisme (merchant artinya dagang). Sebelum dikenal dengan adanya sistem ekonomi kapitalisme, sejumlah pemikir menyimpulkan bahwa sumber kekayaan bangsa didapat dari keuntungan perdagangan luar negeri. Sebab, pengelolaan kekayaan alam dalam negeri hanya akan cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negerinya. Di sini, keuntungan baru bisa didapatkan apabila terjadi perdagangan dengan bangsa lain, baik ekspor maupun impor barang atau jasa.

Dengan kekayaan alam di bangsa kita, bangsa lain mulai tertarik untuk berdagang dan masuk ke tanah air Nusantara. Sederet bangsa seperti Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda pada awal abad 17 mulai masuk untuk tujuan dagang tersebut. Masuklah Perserikatan Perusahaan Hindia Timur (VOC).

Vereenigde Oostindische Compagnie atau VOC, yaitu Kongsi dagang multi nasional terbesar pada abad ke-17 itu pada akhirnya bukan sekadar berdagang, tetapi memiliki



kekuatan militer, memungut pajak, dan menindas rakyat dengan sistematis. Petani dipaksa menanam rempah untuk pasar Eropa dan yang menolak dibumihanguskan.

Tahun 1870, politik liberal kolonial membuka jalan bagi perusahaan swasta Eropa untuk memperoleh konsesi besar, hak istimewa membuka perkebunan, tambang, dan infrastruktur. Pasar lokal bukan arena kompetitif, melainkan alat ekstraksi bagi modal asing.



Abad ke-19 menghadirkan sistem cultuurstelsel atau tanam paksa di Jawa. Kekayaan mengalir deras ke Amsterdam, sementara rakyat kelaparan. Di saat itu, raja-raja, sultan, kepala-kepala kampung telah ditundukkan dengan berbagai cara. Mulai dari adu domba, hingga konfrontasi langsung dengan senjata. Awalnya dagang, akhirnya kolonisasi. Inilah bentuk awal keserakahan sistemik atau **serakahnomics** yang menghancurkan kedaulatan rakyat Nusantara atas ekonomi dan politiknya.

Usai perang Eropa dan kebangkrutan VOC akibat korupsi besar-besaran dan pembiayaan perangnya, untuk memastikan penguasaan atas kekayaan Nusantara, Belanda sebagai negara mengambil alih Kolonisasi menggantikan Kongsi dagang VOC. Struktur material ini menanam benih **Serakahnomics**, dimana **imperialisme tua VOC – Kolonial Belanda** sebagai pelopor.



Sesudah Kolonialisme-Imperialisme Tua Belanda dan masa penjajahan Transisi Jepang, atas perjuangan yang sabar, kerja yang gigih dan kesetiaan pada nasib bersama kaum terjajah, Persatuan yang dibangun oleh para pendiri bangsa, dideklarasikanlah kemerdekaan negara baru: Indonesia.

Kemerdekaan 1945 – Orde Lama



Sejak awal kemerdekaan, Republik Indonesia masih menata rancang bangun ekonomi Nasional. Sebagaimana motif **VOC dan Kolonialisme**, penguasaan sumber daya alam merupakan faktor utama pendorong kolonialisme dan imperialisme yang serakah

Para pendiri bangsa sadar betul bahwa penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam adalah faktor penting dalam urusan perekonomian. Oleh karenanya, tidaklah dibenarkan dalam konstitusi Pasal 33 UUD 1945 yang disusun mereka, bahwa urusan ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikelola oleh pihak asing atau individu yang serakah, melainkan oleh negara untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.

Hal ini juga ditegaskan oleh UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 yang membawa semangat penataan asset dan akses terhadap objek agraria yang mendelegitimasi atau membatalkan Undang-Undang Agraria Kolonial tahun 1870 (Agrarische Wet). Nasionalisasi asset dan pemerataan akses terhadap tanah, ruang angkasa dan air untuk kemakmuran rakyat diatur.

Hukum Agraria



Upaya ini tentu berkaitan dengan usaha Negara untuk terlepas dari belenggu yang menindas, sisa kaum serakah asing lama, yaitu imperialisme-Kolonial Belanda dan Sekutunya. Namun, Upaya itu tidak menghentikan **serakahnomics** begitu saja. Manipol USDEK dan Deklarasi Ekonomi (Dekon) 1963 untuk mewujudkan Indonesia yang berdikari menemui jalan terjal.

Imperialisme tua tentu terganggu dengan Upaya politik Persatuan Nasional dengan memanfaatkan polarisasi politik aliran dan keserakahan elit Nasional. Akhirnya kepemimpinan Orde Lama tumbang dalam patahan sejarah kelam peristiwa G30S.

1965 – Orde Baru

Presiden Sukarno jatuh di tengah tercabiknyanya Indonesia oleh gejolak politik ekonomi yang akut. Inflasi meroket hingga 600%, dan rapuhnya politik persatuan nasional. Kemunculan sosok Soeharto sebagai figur penjaga stabilitas menandai berakhirnya orde lama dan lahirnya rezim baru.



Ketika Presiden Soeharto tampil sebagai penguasa republik, dibukalah aliran modal asing melalui UU PMA yang disahkan tahun 1967. Investasi asing mulai berkelindan merambah sektor industri ekstraktif di Indonesia. Pembangunan infrastruktur melejit hingga peningkatan produksi pangan sempat mencapai swasembada.

Di bawah permukaan keberhasilan orde baru menyelamatkan ekonomi nasional yang di jaga ketat oleh stabilitas politik (represif), Presiden Soeharto sadar maupun tidak sadar telah berhasil memelopori keberadaan **Oligarki**.

Dengan cara rezim Orba yang otoriter, dimana Soeharto menjadi patron atau pusat dari hukum dan kuasa, sistem hukum menjadi lemah. TNI-Polri (ABRI waktu itu) dan Lembaga yudikatif, Pejabat pemerintah eksekutif, serta anggota legislatif dikontrol penuh oleh Presiden Suharto.



Dalam sistem yang seperti itulah kultur politik bagi-bagi dilanggengkan. Orang-orang yang dekat dengan Soeharto mendapat kemudahan akses dan perlindungan untuk bermain dalam perekonomian nasional. Kultur bagi - bagi dan birokrasi korup pada akhirnya melahirkan orang-orang super kaya (oligark) dan sistem oligarki yang kokoh di Indonesia, dimana Soeharto sebagai “sultan”nya.

Oligarki ini bukan sekadar kumpulan segelintir orang kaya, tetapi jaringan tertutup antara penguasa politik, militer dan pengusaha yang saling untung mengukuhkan kepentingan ekonominya. Lingkaran inti Soeharto menjadi pusat sistem ini, yang mana mereka menguasai sektor strategis perekonomian dengan pemberian monopoli, perizinan khusus dan kemudahan berusaha.

Orde Baru

Dalam sistem dan kultur yang sama pula, tumbuh subur pemalakkan atau pengambilan upeti modern kepada siapa saja pelaku ekonomi yang butuh kehadiran negara. Privilege keluarga Cendana serta yang mengaku-ngaku dekat ikut menambah kemeriahan panggung orang-orang serakah. **Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)** mengakar sampai di daerah-daerah sebagai budaya ekonomi-politik nasional.



Indonesia memang menikmati pertumbuhan dan stabilitas makro ekonomi selama bertahun-tahun namun hal itu dibayar dengan kesenjangan yang semakin melebar dan praktik ekonomi yang tidak sehat. Pembangunan hanya terpusat di Jakarta dan beberapa daerah saja, sementara daerah lainnya tertinggal. sementara secara politik, sistem ini mematikan kedaulatan rakyat

Ketika krisis finansial Asia 1997-1998, Kapitalisme global (imperialis) butuh reformasi, Soeharto yang menghidupi para Oligark Nasional sudah tidak dibutuhkan (termasuk para oligark yang terganggu juga dengan kehadiran keluarga dan yang mengaku dekat Soeharto mengancam kepentingannya), serta besarnya mobilisasi politik rakyat dan aktivis 98, maka mundurlah Soeharto dari kekuasaan tertinggi. **Para Oligark dan elit yang pernah Soeharto lindungi, tutup mata dan tak berbuat apa-apa. Demikianlah sistem ekonomi yang dibangun di atas keserakahan di era Orde Baru.**

1998 – Reformasi



Kejatuhan Soeharto 1998 tidak serta-merta meruntuhkan oligark dalam penguasaan sumber daya ekonomi nasional. Agenda imperialis atau kapitalisme global masih merongrong Indonesia. Pada periode transisi ini, pejabat Indonesia ikut resep International Monetary Fund (IMF).

Kesepakatan yang keliru IMF dan Indonesia waktu itu adalah mengentikan dukungan pemerintah pada industri-industri strategis seperti industri agro, dan pengembangan industri penerbangan (IPTN), nilai tukar rupiah harus diserahkan seluruhnya ke pergerakan pasar, BUMN harus dijual dan perdagangan luar negeri harus dibuka lebar. Itulah salah satu sebab Indonesia tidak pernah lepas landas dari industri ekstraktif bahan mentah, menuju industri olahan dan barang jadi.

Sistem neoliberalisme yang di suap oleh IMF kepada para pejabat, kemudian kultur KKN yang mengakar pada elit dan birokrasi Indonesia, serta masih eksisnya oligark warisan Orde Baru terus memangsa kekayaan nasional untuk kepentingan segelintir orang saja, sementara rakyat banyak harus hidup dalam kemiskinan.

Sejak era reformasi, berganti-ganti presiden dari Habibie, Gusdur, Megawati, SBY sampai Jokowi sampai sekarang, struktur serta sistem Serakahnomics ini masih hidup dan menjadi musuh bangsa dan rakyat Indonesia



Wakil Direktur Pelaksana IMF Stanley Fischer (tengah) didampingi Hubert Neis (kiri) bertemu dengan ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) di Jakarta Sabtu (18/6/1999). Stanley berada di Indonesia dan melakukan pertemuan maraton dengan beberapa tokoh partai pemenang pemilu 1999 di Indonesia. ANTARA FOTO/Jaka Sugiyanta/Koz/99.

Akhirnya, buah reformasi yang tidak sungguh-sungguh itu menjebak bangsa kita ke tahapan kemunduran ekonomi dengan deindustrialisasi prematur, politik yang rentan pecah-belah, serta hilangnya karakter bangsa yang mandiri dan berdaulat.

III. WUJUD SERAKAHNOMICS: 3 MUSUH RAKYAT INDONESIA

Kaum **serakahnomics** dapat kita tunjuk dengan mudah sebagai musuh rakyat Indonesia yang selama ini menumpuk kekayaan pribadi dengan cara curang dan merugikan rakyat banyak usai memahami akar historisnya.

Pergantian era dari masuknya VOC hingga sekarang, dapat kita temui 3 unsur atau wujud yang melanggengkan sistem ekonomi rakus atau **serakahnomics**. 3 wujud ini saling mendukung satu sama lain dan diwarisi dari periode ke periode sampai sekarang.

Wujudnya adalah pertama, **imperialis** yaitu pihak bangsa asing yang hendak membangun imperium dunia (atau globalis), suatu bangsa yang menguasai bangsa lain dengan cara curang baik melalui perang fisik, dagang hingga hegemoni budaya. Kedua, **Oligarki** yaitu pelaku ekonomi yang memiliki sumber daya material super kaya, terkonsentrasi pada segelintir orang, dan upayanya untuk mempertahankan kekayaan tersebut. Ketiga, **elit dan birokrat korup** yaitu orang-orang yang mengakses kekuasaan atau penyelenggara negara baik secara langsung sebagai pejabat maupun bukan.

1. Imperialis (Kapital Global)

Akibat kekuasaan imperialisme, sumber daya alam serta kehidupan ekonomi, hanya digunakan untuk melayani kemajuan negara-negara lain. Dengan pengaruhnya, baik ideologi, politik dan ekonomi, mereka selalu melemahkan dan memecah belah bangsa Indonesia. Mereka terus menerus menghalangi kemajuan bangsa Indonesia, dengan cara mendeligitimasi program-program kerakyatan, kepemimpinan dan persatuan nasional, agar mereka bisa leluasa merampok sumber daya alam kita. Tidak ada sedikitpun keinginan bagi kaum Serakah-nomic untuk memajukan serta memakmurkan kehidupan satu bangsa yang mereka kuasai, selain ekspansi dan dominasi kekuasaan kapital mereka.

Bentuk Modern Imperialisme:

- Financial imperialism: Utang luar negeri Indonesia USD 407,3 miliar (BI, 2024), dengan pembayaran bunga Rp 180 triliun/tahun (Kemenkeu)
- Resource imperialism: 75% tambang mineral dikuasai asing (ESDM, 2023)
- Digital colonialism: GoTo, Tokopedia, dan Traveloka mayoritas sahamnya dimodal ventura asing

2. Oligarki

Kaum Serakahnomics ini, adalah segelintir orang yang kehidupannya menguasai sumber daya alam, lahan, pertambangan, perkebunan, perhutanan, perikanan, perdagangan, pangan, energi. Dengan kekuasaan kapitalnya mereka terus menerus mengintervensi kehidupan politik, melalui lembaga-lembaga politik, untuk memenangkan agendanya, yaitu menguasai sumber-sumber kehidupan ekonomi. Struktur Oligarki Kontemporer (menurut Vedi Hadiz, 2016):

- 40 orang menguasai kekayaan setara 10% PDB Indonesia (Forbes, 2024)
- 5 grup konglomerat menguasai 60% aset perbankan (OJK, 2024)
- Politik biaya tinggi: Pemilu 2024 menghabiskan Rp 112 triliun, didominasi pendanaan oligark (KPU)

Contoh Modus Operandi:

- Regulatory capture: Perpu Cipta Kerjo yang menguntungkan pemilik modal
- Tax avoidance: 75% perusahaan tambang laporkan rugi tapi tetap beroperasi (Direktorat Jenderal Pajak, 2023)

3. Elit dan Birokrat Korup

Dalam sistem yang baik, akan menghasilkan kepemimpinan yang baik, namun di bawah kekuasaan yang imperialistik dan oligarkis, akan menghasilkan elit dan birokrat korup. Elit dan birokrat akan bertindak menjadi agen-agen dengan imbalan sogokan serta fasilitas, memanipulasi anggaran negara dan mencuri uang negara. Kelompok ini hanya hidup untuk memperkaya diri, tidak peduli nasib bangsa dan negaranya. Mereka adalah tikus tikus gemuk, yang hidup di tengah masyarakat yang miskin. Data Empiris:

- Kerugian negara akibat korupsi Rp 150 triliun/tahun (KPK, 2024)
- 229 kepala daerah tersangka korupsi sejak 2004 (KPK)
- Gratifikasi mencapai Rp 1,2 miliar/hari yang diterima pejabat (KPK, 2023)

Imperialisme, Oligarki dan Birokrat Korup adalah tiga musuh rakyat Indonesia, mereka adalah kaum serakahnomics yang menjadikan hidup rakyat Indonesia terjajah dan miskin, maka dari itu agar bangsa Indonesia bangkit, hidup adil dan makmur, lahir maupun batin. Tidak ada jalan, selain melenyapkan kaum serakahnomics dari bumi Pertiwi Indonesia.

Imperialis tidak akan mudah menguasai bangsa ini jika tidak disetujui para pemimpin nasional. Para pemimpin nasional tidak dapat berdaulat jika dihadapannya ada modal besar dan oligark rakus. Birokrat dan elit dengan akses kekuasaan dapat dengan mudah memberi ruang pada oligark dan imperialis untuk menyerap kekayaan nasional, bahkan mereka sendiri juga dapat korup. Persekongkolan serakah inilah musuh kita. Musuh negara dan bangsa Indonesia.

IV. ANTI TESIS SERAKAHNOMICS

Bumi, air dan kekayaan alam, dikuasai negara bukan swasta ataupun asing. Dikelola dengan sistem kekeluargaan, bukan kapitalistik, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk segelintir kaum **serakahnomics**.

Kita harus kembali ke Pancasila sebagai dasar dan bintang penuntun arah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan menjalankan secara konsekuen amanat konstitusi, yaitu Pasal 33 UUD 1945. Sistem ekonomi yang memosisikan swasta, negara dan rakyat sebagai pelaku ekonomi, harus menempatkan sektor ekonomi yang strategis dan menyangkut kehidupan umum, dikuasai negara, dan menjadikan rakyat sebagai subyek ekonomi.

Trickledown effect yang kapitalistik harus diganti dengan konsep ekonomi bottom up, dengan menjadikan rakyat sebagai subyek dan koperasi sebagai jalan pembangunan ekonomi. Menjadi soko guru ekonomi Bangsa.

Melawan kaum serakahnomics mesti menyasar pada persoalan pokok ekonomi. Ketika sumber daya produksi dikuasai kaum **serakahnomics**, rakyat tidak akan Sejahtera. Bagaimana kita akan Sejahtera, Mandiri dan berdaulat atas pangan, energi dan air jika petani tidak punya tanah, modal, teknologi dan pasar?

Bagaimana jika nelayan tidak bisa menangkap ikan atau budidaya ikan jika ruang laut dikapling orang-orang serakah, nelayan tak punya alat tangkap, modal, bahan bakar mahal? Bagaimana buruh akan Sejahtera jika ia mengabdikan pada pemilik Perusahaan yang memberinya upah rendah, jam kerja lebih, tiada jaminan apapun?

Bagaimana UMKM kita akan hidup dengan kualitas ekspor jika rakyat kecil dan menengah terkendala modal, terhimpit pengusaha serakah, tanpa bantuan dan perlindungan negara? Bagaimana pekerja informal hidup Sejahtera jika tanpa perlindungan negara? Bagaimana anak muda mendapat pekerjaan yang layak jika negara tidak menyiapkan semua kebutuhannya? Bagaimana kaum muda dapat berkreasi, menciptakan kekuatan ekonomi baru, jika pendidikan dan teknologi dasar masih tertinggal?

PASAL 33 UUD 1945 VS Serakahnomics

Prinsip Dasar:

- Asas kekeluargaan $\neq$ **charity**, tapi kooperatif produktif
- Penguasaan negara $\neq$ **etatisme**, tapi kedaulatan politik atas ekonomi
- Kemakmuran rakyat $\neq$ **trickle-down**, tapi distribusi struktural

Model Keberhasilan:

- Petrobras Brasil (1953): Negara kuasai minyak, revenue bagi program sosial
- Statoil Norwegia (1972): Minyak dikelola negara, dana abadi USD 1,4 triliun
- Koperasi Mondragon Spanyol: 80.000 anggota, omset EUR 12 miliar (2023)

Strategi Bottom-up Ekonomi

Bukti Empiris Keberhasilan:

- Vietnam: Pertanian kolektif $\rightarrow$ ekspor beras terbesar ke-2 dunia
- China: Township Village Enterprises (TVEs) serap 150 juta tenaga kerja
- Jerman: Mittelstand (UMKM) penyumbang 53% PDB dan 60% tenaga kerja

POSISI PEMERINTAH SEKARANG

Saat ini Pemerintah Nasional sedang berjuang untuk mengenyahkan sistem **serakahnomics** dari Bumi Indonesia. Negara harus menjadi pelopor ekonomi nasional, bukan sekedar regulator, dengan menjadikan rakyat sebagai subyek ekonomi.

Salah satu langkah yang paling kongkrit adalah dengan penerbitan PP Nomor 8 tahun 2025, tentang Devisa Hasil Eksport (DHE) yang wajib disimpan dalam negeri, penertiban aset agraria dengan menyita lahan perkebunan dan pertambangan ilegal melalui peraturan Presiden 05 Tahun 2025. Inpres. Kemudian No. 9 tahun 2025, tentang Koperasi Desa-Kelurahan yang menjadikan rakyat sebagai tulang punggung ekonomi, adanya program Pengentasan kemiskinan dengan program pemberdayaan, makan bergizi gratis (MBG) dan sekolah rakyat.

VI. TUGAS KITA MELAWAN SERAKAHNOMICS

Gotong Royong Mendukung Visi Indonesia Emas 2045 dan Front Persatuan Nasional

Visi pembangunan ekonomi bangsa yang bertumpu pada Pasal 33 UUD 1945 terus menerus digelorakan oleh Presiden Prabowo, melalui tindakan programatik dan termuat dalam berbagai regulasi.



Untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan, ada pihak-pihak yang belum Memahami program tersebut. Pihak-pihak yang hanya mementingkan diri sendiri, keluarga atau kelompoknya dan mengabaikan kepentingan rakyat, apalagi dengan cara curang, masih bercokol di republik ini.

Tanpa meniadakan sistem ekonomi dan aktor-aktor yang serakah, **kaum serakahnomics**, bangsa ini tidak akan keluar dari jurang ketimpangan sosial, politik, ekonomi. Bahwa perilaku dan sistem serakahnomics ada di setiap sumsum kehidupan sehari-hari, maka upaya kita harus menjangkau semua sektor kehidupan itu.

Membangun Front Persatuan Nasional dengan menggalakan kekuatan rakyat lintas sektor, mulai dari petani, buruh, kaum muda dan mahasiswa, tukang ojek, pekerja informal, kaum miskin perkotaan, pelaku UMKM, seniman dan budayawan, ilmuwan, aparatur sipil dan militer negara sampai pengusaha nasionalis untuk melawan **serakahnomics**.



Maka tugas kita sebagai anggota LMND adalah mendukung visi pemerintahan untuk kemajuan Bangsa dan Negara dan mengajak seluruh elemen bangsa untuk berjuang bersama. Tanpa dukungan politik rakyat dan organisasi yang maju dan kuat, cita-cita kemandirian bangsa hanyalah ilusi.

Dukungan kita bukanlah sekadar arak-arakan orang tanpa kesadaran dan tanpa visi. Dukungan kita mestilah dipandu oleh Program yang jelas dan terukur. Oleh karena itu penting untuk setiap kita memahami program LMND.

Program Umum dan Program Tuntutan LMND



Sejak dibentuknya Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) pada tanggal 9-11 Juli 1999, telah secara tegas posisi partai menentang imperialisme, oligarki dan birokrat korup, karena tiga unsur Serakahnomics inilah penyebab rakyat Indonesia sejak zaman kemerdekaan sampai sekarang miskin.

Gerakan ini sedang dijalankan Pemerintah Nasional. Untuk itu, LMND akan mendukung program nasionalis kerakyatan ini, sekaligus menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mendukung, mengawal dan mengamankan program-program tersebut.

Adapun dalam upaya programatik melawan **serkahnomics**, jalan LMND yang akan di tempuh dan dimenangkan, baik dalam posisi sekarang maupun dalam posisi persiapan jangka panjang, yaitu:

Program Umum :

Bangun Persatuan Nasional Hentikan Imprialisme-Neoliberalisme Dan Wujudkan Sosialisme Indonesia

Program Tuntutan:

1. ***Wujudkan Hilirisasi dan industrialisasi nasional yang berbasis pada pasal 33 UUD 1945 untuk Kesejahtaraan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia***
2. ***Wujudkan Pendidikan Gratis, Ilmiah dan Demokratis untuk seluruh rakyat Indonesia***
3. ***Wujudkan Kesehatan Gratis untuk Rakyat Indonesia***
4. ***Wujudkan Identitas Kebudayaan Nasional***

Terhadap program-program tersebut di atas kebutuhan dan artikulasi politik yang menjadi tiga program mendesak, yang merupakan antitesa dari **Serakahnomics** adalah sebagai berikut :

a. Industrialisasi Nasional, sebagai antitesa dari Imprealisme asing

b. Pangan untuk Rakyat, Sebagai antitesa dari Oligarki

c. Pemerintahan bersih, sebagai antitesa dari Birokrat Korup

VII. KESIMPULAN

Serakahnomics bukanlah takdir, melainkan pilihan sistemik yang bisa diubah melalui, dengan ilmu, persatuan, dan keberpihakan pada rakyat, Indonesia pasti bisa mewujudkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.